

PENGARUH IMPLIMENTASI SARBANES-OXLEY ACT SEKSI 404 TERHADAP EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN DAN IMPLIKASINYA PADA KINERJA INTERNAL AUDITOR

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi Sarbanes oxley Act (SOA) Seksi 404 yang meliputi implementasi dokumentasi, evaluasi dan pelaporan terhadap efektivitas pengendalian intern, serta implikasinya terhadap kinerja internal auditor.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis jalur (*path analysis*) dan analisis korelasi. Metode yang digunakan adalah metode ekplanasi untuk permasalahan aosiatif yang menggunakan hubungan kausal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) implementasi **dokumentasi** berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian intern yaitu sebesar 0,755, dengan pengaruh langsung 43,80%, pengaruh tidak langsung melalui variable **evaluasi** -37,40% dan melalui variable **pelaporan** -72,80%; (2) implementasi **evaluasi** berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian intern sebesar 0,591 dengan pengaruh langsung 65,40%, pengaruh tidak langsung melalui variable **dokumentasi** sebesar -37,40 dan melalui variable **pelaporan** -250,50%, (3) implementasi **pelaporan** tidak berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pengendalian intern sebesar 0,285 dengan pengaruh tidak langsung melalui variabel **dokumentasi** -72,28%, dan melalui variable **evaluasi** -250,50%, (4) implementasi **dokumentasi**, **evaluasi**, dan **pelaporan** secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian intern sebesar 0,928, (5) efektivitas pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kinerja internal auditor sebesar 0,702 dengan pengaruh langsung 49,305, pengaruh tidak langsung dari variable dokumentasi melalui mediasi variable efektivitas pengendalian intern 46,59%, dan dari varibel evaluasi melalui mediasi variable efektivitas pengendalian intern 56,80%.

Keywords : implementasi SOA Seksi 404, efektivitas pengendalian intern, dan kinerja internal auditor.

ABSTRAK

Pengaruh Biaya Akuisisi Terhadap Beban Pajak Penghasilan (Suatu Kasus Pada PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) penggunaan metode akuntansi yang dilaksanakan dalam proses akuisisi untuk jenis usaha telekomunikasi ini; (2) aspek-aspek perpajakan apa saja yang terkait dengan pelaksanaan proses akuisisi untuk jenis usaha telekomunikasi; dan (3) transaksi akuisisi mempengaruhi besaran Pajak penghasilan perusahaan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *explanatory*, dengan menganalisis biaya akuisisi dan beban pajak penghasilan perusahaan. Biaya akuisisi terdiri dari biaya investasi, biaya bunga pinjaman dan biaya rugi selisih kurs. Obyek penelitian ini adalah transaksi akuisisi yang dilakukan pada PT Telkom, terhadap PT Pramindo, PT Dayamitra dan PT Aria West, dengan melakukan penelitian terhadap pelaksanaan metode akuntansi dan pelaksanaan peraturan perpajakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) metode akuntansi yang digunakan dalam proses akuisi adalah *Purchase Method* yaitu aktiva dicatat sebesar harga wajar dari hasil appraisal; (2) aspek perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan akuisisi adalah pajak penghasilan, perusahaan telah melaksanakan aturan pajak penghasilan dan melakukan koreksi fiskal atas biaya akuisisi yang *non deductible expenses*; (3) berdasarkan uji statistik pengaruh biaya investasi akuisisi terhadap beban pajak penghasilan adalah sebesar 97%. Artinya, besarnya beban pajak penghasilan dipengaruhi oleh investasi akuisisi sebesar 97%. Hal ini berarti jika investasi akuisisi pada PT Telekomunikasi, Tbk ditingkatkan, maka akan mempengaruhi peningkatan beban pajak penghasilan.

Keywords: Akuisisi, dan Beban Pajak Penghasilan.

ABSTRAK

AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN INSTANSI PEMERINTAH SEBAGAI UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMENUHI TUNTUTAN MASYARAKAT

Good government governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan tuntutan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam menerapkan *good government governace* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna (efisien), berhasil guna (efektif), bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memenuhi tuntutan masyarakat adalah dengan mengeluarkan INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi pemerintah.

Keywords : Akuntabilitas, kinerja keuangan, tuntutan masyarakat.